



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

2017



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2016

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M
NIP. 19660711 199203 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No. (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Seluruh pemegang izin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60 %
2.	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan LH	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	40 Kasus
3.	Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	4 juta ha

No.

Program/ Kegiatan

- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
 1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).
 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran (x Rp.1000,-)
235.719.413

Jakarta, Desember 2016

MENTERI
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN

Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M.
 NIP. 19660711 199203 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Kemal Amas, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Ir. Kemal Amas, M.Sc
NIP. 19590725 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75 Poin
		Layanan Internal	1 layanan
		Layanan Perkantoran	12 Bulan

Program/Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Anggaran

Rp. 52.544.687.000,-

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Penegakan Hukum LHK



Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018



Ir. Kemal Amas, M.Sc
 NIP. 19590725 198603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD

Jabatan : Direktur Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama,
Direktur Penanganan Pengaduan
Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD
NIP.19700501 199603 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI**

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Optimalisasi upaya penanganan pengaduan, pengawasan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU dan ketaatan terhadap sanksi Administrasi	Persentase penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	25% dari 500 Pengaduan
		Persentase Penanggungjawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	20% dari 500 Izin
		Sanksi Administrasi yang di taati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun	70% dari 100 Sanksi
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	43 PPLH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaksanaan, Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	14 PPLH
		Layanan Internal	1 Layanan

Program/Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Total

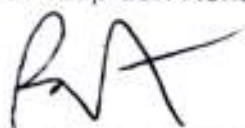
Anggaran

Rp. 946.970.000,-

Rp. 10.000.000.000,-

Rp. 10.946.970.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama,
Direktur Penanganan Pengaduan
Pengawasan dan Sanksi Administrasi



Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD

NIP.19700501 199603 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MH
Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama,
Direktur
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Jasmin Ragil Utomo, SH, MH
NIP. 19640603 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Optimalisasi Upaya Penyelesaian Sengketa bidang LHK	Pendaftaran dan Penyelesaian Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	10 Gugatan
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di Luar Pengadilan yang telah di Verifikasi	75%
		Layanan Internal	1 Layanan

Program/Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Total

Anggaran

Rp. 941.570.000,-

Rp. 8.199.000.000,-

Rp. 9.140.570.000,-

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
Direktur
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018



Jasmin Ragil Utomo, SH, MH
NIP. 19640603 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Indra Exploitasia
Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2017

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan Pengamanan
Hutan

Drh. Indra Exploitasia
NIP. 19660618 199203 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Meningkatnya keamanan terhadap gangguan dan ancaman lingkungan hidup dan kehutanan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	500.000 Ha
		Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan operasi	5 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	143 Orang
		Layanan Internal	1 Layanan

Program/Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Total

Anggaran

Rp. 1.177.280.000,-

Rp. 13.000.000.000,-

Rp. 14.177.280.000,-

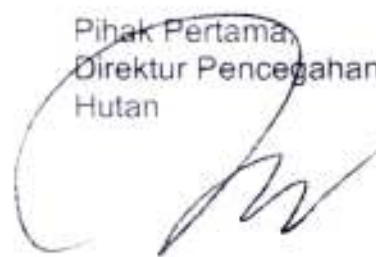
Jakarta, Juli 2017

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan Pengamanan
Hutan



Drh. Indra Exploitasia
NIP. 19660618 199203 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Yunus, M.Si
Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana

l. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Drs. Muhammad Yunus, M.Si
NIP. 19610116 1995 93 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara profesional	Persentase Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)	10% dari 150 Kasus
		Verifikasi Perkara Pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25 Perkara
		Persentase Barang Bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	20% dari 75 Barang Bukti
		Fasilitasi penanganan kasus	15 Kasus
		Persentase Pelaksanaan Eksaminasi Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20% dari 15 Eksaminasi
		Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang	260 Orang
		Layanan Internal	1 Layanan


Program/Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya
Penegakan Hukum Pidana
Total

Anggaran
Rp. 871.000.000,-
Rp. 12.826.100.000,-
Rp. 13.697.100.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana


1. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018


Drs. Muhammad Yunus, M.Si
NIP. 19610116 1995 93 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Edward Sembiring, S.Hut, M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, September 2017
Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sumatera

Edward Sembiring, S.Hut, M.Si.
NIP. 19730530 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH SUMATERA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	800.000 Ha
		Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan Operasi	8 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	275 Orang
		Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	4 Brigade SPORC
		Layanan Internal	1 Layanan
2	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	22 % dari 500 Pengaduan
		Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	8 % dari 500 izin
3	Penegakan Hukum Pidana	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P.21)	11 % dari 150 Kasus
		Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	38 Kasus/Perkara
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	22% dari 75 Barang Bukti

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp. Anggaran 32.184.467.000



Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, September 2017
Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sumatera

Edward Sembiring, S.Hut, M.St.
NIP. 19730530 199908 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Jawa Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

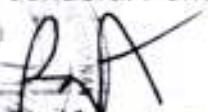
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, Januari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK Jabalnusra,


Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018


Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc
NIP 19640307 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JAWA BALI NUSA TENGGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran	12 Bulan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan.	600.000 Ha
		Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	7 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	3 Brigade
		Layanan internal (Overhead)	1 Layanan
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	19 %
		Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	20 %
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	3 PPLH
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P 21	10 %
		Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	33 Kasus
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	20 %

Kegiatan:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Anggaran

Rp 28 688 885 0000 -

Sidoarjo, Januari 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala BPPHLHK Jabalnusra

Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc

NIP 19640307 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM


Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19560711 199203 1 018

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Kalimantan



Subhan, S.Hut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH KALIMANTAN**

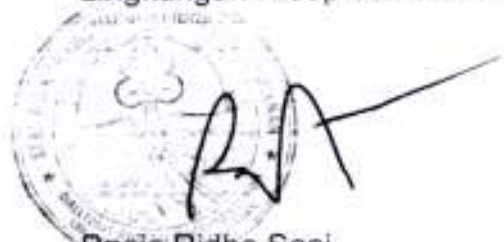
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	720.000 Ha
		Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan Operasi	5 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang
		Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	3 Brigade SPORC
		Layanan Internal	1 Layanan
2	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	15% dari 500 Pengaduan
		Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	4% dari 500 izin
3	Penegakan Hukum Pidana	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P.21)	8% dari 150 kasus
		Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	25 Perkara
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	16% dari 75 Barang Bukti

Program
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggaran
Rp. 27.690.753.000

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Kalimantan



Rasio Ridho Sani
NIP. 19660711 199203 1 018



Subhan, S.Hut, M.Si
NIP.19730320 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Muhammad Nur, MSP

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,
Kepala BPPH LHK
Wilayah Sulawesi



Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP. 19670727 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH SULAWESI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	650.000 Ha
		Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan Operasi	5 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang
		Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	3 Brigade SPORC
		Layanan Internal	1 Layanan
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	11% dari 500 Pengaduan
		Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	6% dari 500 izin
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 PPLH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	2 PPLH
4	Penegakan Hukum Pidana	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P.21)	6% dari 150 Kasus
		Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	16 Perkara
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	12% dari 75 Barang Bukti
		Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang	20 Orang
		Layanan internal	1 Layanan

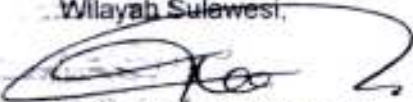
Program/Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Rp. 13.410.677.000,-
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 5.472.050.000,-
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.500.000.000,-
Penegakan Hukum Pidana	Rp. 3.705.000.000,-
Total	Rp. 24.087.727.000,-

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama,
Kepala BPPH LHK
Wilayah Sulawesi,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018


Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP. 19670727 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.G Martana, S.Hut, M.H

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, Oktober 2017

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua

A.G Martana, S.Hut, M.H.
NIP. 19721002 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
WILAYAH MALUKU PAPUA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	730.000 Ha
		Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan Operasi	4 Provinsi
		Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	272 Orang
		Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	3 Brigade SPORC
		Layanan Internal	1 Layanan
2	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	6 % dari 500 Pengaduan
		Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	2 % dari 500 izin
3	Penegakan Hukum Pidana	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P.21)	5 % dari 150 Kasus
		Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	13 Kasus/Perkara
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	10% dari 75 Barang Bukti
4	Layanan Internal	Peralatan dan Mesin	12 Bulan

Program
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

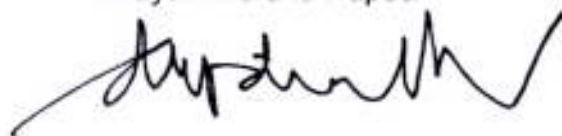
Anggaran
Rp. 22.580.974.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, Oktober 2017
Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua



A.G Martana, S.Hut, M.H.
NIP. 19721002 199903 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

2017

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI – BLOK IV LANTAI 4
JL. GATOT SUBROTO, JAKARTA PUSAT